

**PARTY-ID DAN TENDENSI POLITIK UANG DI PROVINSI BALI :  
Studi Kasus Pilkada Bali Tahun 2018**

**PARTY-ID AND VOTE BUYING TENDENCY IN BALI: A Case  
Study Of 2018 Regional Election**

**Kadek Dwita Apriani**  
FISIP Universitas Udayana, Bali  
kadek88@gmail.com

**Irhamna**  
Direktorat Politik dan Komunikasi,  
Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta  
irhamna.irham@gmail.com

**Abstract**

*The symptoms of weakening party-identification (party-id) has been a major phenomenon in Regional Elections in Indonesia. Through the electoral politics perspectives, the weakening of party-id has been identified as one of the factors which contributed to the increasing rate of vote buying at the grassroots level. In other words, the stronger the party-id, the lower the tendency of vote buying. This hypothesis was being tested in Bali, a province hat have the highest percentage of voters with party-id in Indonesia. This study used quantitative methods through surveys to 1080 respondents which proportionally spread across all districts in Bali, conducted in May 2018. The study suggests there is a signifiant correlation between party-id and vote buying tendency. Voters with higher party-id are having the higher chances in accepting vote buying.*

**Keywords:** Bali, regional election, party-id, vote buying

**Abstrak**

Gejala melemahnya identifikasi pemilih terhadap partai politik (*party-identification/party-id*) telah menjadi fenomena umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Dalam konteks politik elektoral, melemahnya *party-id* kerap dipandang memberi kontribusi pada

peningkatan praktik jual beli suara (*politik uang/vote buying*) pada tataran akar rumput. Dengan kata lain, semakin kuat *party-id* maka tendensi terhadap politik uang akan semakin rendah. Hipotesis tersebut coba untuk dibuktikan dengan mengkaji pemilihan kepala daerah di satu wilayah yang dinilai memiliki persentase pemilih dengan *party-id* terbesar di Indonesia yaitu Bali. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui survei terhadap 1080 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh kabupaten/kota di Bali pada bulan Mei tahun 2018. Penelitian ini menemukan adanya hubungan yang signifikan antara identifikasi partai politik dengan sikap pemilih terhadap praktik politik uang dalam Pilkada Bali 2018. Pemilih dengan *party-id* justru memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam menerima praktik politik uang.

**Kata Kunci :** Bali, Pilkada, *party-id*, politik uang

## 1. Pendahuluan

Lanskap politik dan demokrasi Indonesia pascareformasi telah bergerak menuju proses konsolidasi demokrasi. Proses transisi tersebut juga diperkuat dengan mekanisme elektoral yang tepat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pilkada langsung kerap menjadi momentum untuk melihat kuat lemahnya identifikasi pemilih terhadap partai politik di satu wilayah.

Dalam konteks Indonesia, pengidentifikasian individu terhadap partai mengalami dinamika dari setiap penyelenggaraan Pemilu, kecenderungannya secara keseluruhan identitas kepartaian mengalami penurunan yang tajam. Pada awal Reformasi diketahui angka *party-id* sangat tinggi. Data tahun 1999 menunjukkan *party-id* pemilih di Indonesia berada di kisaran 86 persen. Salah satu penyebab

tingginya tingkat identifikasi partai pada waktu itu adalah mobilisasi yang bersifat partisan dalam balutan euforia demokratisasi. Setelah Pemilu 1999, *party-id* cenderung mengalami penurunan pada rentang waktu 2002-2014 yang salah satunya disebabkan oleh ketidakmampuan atau kegagalan partai politik dalam menjaga ekspektasi konstituen, bahkan pada tahun 2014, *party-id* hanya tinggal sekitar 9 persen (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2019). Argumen senada juga diungkapkan Muhtadi (2013) yang menjelaskan bahwa tren penurunan tersebut disebabkan oleh kegagalan partai politik untuk meningkatkan kinerjanya di mata konstituen (Muhtadi, 2013).

Pada sisi lain, Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada pascareformasi menunjukkan tren penggunaan politik uang yang semakin tinggi. Muhtadi (2019), mengukur intensitas penggunaan politik uang melalui *Vote Buying Index* secara nasional

dengan prevalensi antara 25-33 persen. Dengan prevalensi tersebut, politik uang di Indonesia merupakan yang ketiga terbesar di dunia (Muhtadi, 2019). Tingginya prevalensi penggunaan politik uang juga berkaitan dengan faktor-faktor sosial-ekonomi seperti tingkat pendidikan dan pendapatan serta sikap permisif masyarakat yang cenderung toleran terhadap relasi patron-klien (Muhtadi, 2013). Lebih lanjut dalam riset yang dilakukan oleh Aspinall (2014), relasi patron-klien tersebut terbentuk dan difasilitasi oleh munculnya fenomena *brokers* yang menjadi *middle man* antara kandidat dan konstituen dalam jaringan pemenangan yang terstruktur (Aspinall, 2014).

Pilkada Bali 2018 diikuti oleh dua pasang kandidat yaitu Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra - Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta) dan I Wayan Koster - Cokorda Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace). Pasangan Mantra-Kerta mengantongi 28 kursi dukungan di DPRD Bali. Terdiri dari Partai Golkar (11 kursi), Demokrat (8 kursi), Gerindra (7 kursi), dan Nasdem (2 kursi). Sementara itu, pasangan Koster-Ace mengantongi 27 kursi, terdiri dari PDIP (24 kursi), Hanura (1 kursi), PAN (1 kursi), dan PKPI (1 kursi). Meskipun memiliki dukungan kursi yang lebih rendah, pasangan Koster-Ace pada akhirnya memenangkan Pilkada Bali 2018 dengan perolehan suara mencapai 57,68 persen (KPU

Provinsi Bali, 2020).

Temuan Muhtadi (Muhtadi, 2013) menyebutkan tendensi politik uang pada masyarakat Bali diduga lebih rendah dibanding masyarakat Indonesia secara umum. Data dari hasil riset yang sama memperlihatkan, sekitar 82 persen pemilih Bali pada tahun 2013 menyatakan bahwa politik uang merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima. Lebih lanjut, sebanyak 75 persen pemilih menyatakan menolak bila diberi uang oleh kandidat dalam sebuah pemilihan. Angka ini dapat dilihat sebagai bagian dari argumen dasar yang diangkat oleh penelitian ini bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara identifikasi partai politik dan tendensi politik uang.

Data mengenai prevalensi terhadap politik uang di Bali seperti yang dipaparkan di atas telah berumur lebih dari lima tahun. Banyak dinamika politik yang telah terjadi dan kemungkinan mempengaruhi prevalensi tersebut. Oleh karena itu, kami melihat perlunya penelitian lebih lanjut untuk memberikan gambaran mutakhir terkait dengan politik uang di Bali, khususnya pada Pilkada Bali 2018.

Identifikasi partai politik menjadi faktor yang dapat menjelaskan perilaku memilih masyarakat pada masa awal reformasi. Pengaruh faktor ini terus menurun dari pemilu ke pemilu hingga berdasarkan penelitian Mujani dkk., (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2019) diketahui

pada tahun 2014, masyarakat yang mengidentifikasi diri dengan partai politik di Indonesia hanya tersisa 14 persen. Meski faktor ini terbaca sangat lemah di level nasional, terdapat catatan Burhanuddin Muhtadi (2013) menyebutkan satu kondisi khusus yang terlihat di Provinsi Bali. Muhtadi (2013) menyebut bahwa temuan risetnya di Bali menunjukkan angka identifikasi partai politik pemilih di Bali jauh melebihi angka rata-rata nasional, namun ia tak menyebutkan berapa persen pemilih Bali yang masih mengidentifikasi diri dengan partai politik tertentu pada saat penelitian tersebut dilaksanakan.

Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah pemilih di Bali yang masih mengidentifikasi diri dengan partai tertentu serta hubungannya dengan politik uang, seperti yang diuraikan dalam pertanyaan penelitian berikut ini, *bagaimana hubungan antara identifikasi partai politik dengan sikap pemilih terhadap praktik politik uang dalam Pilkada Bali 2018?*

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data melalui survei dilakukan pada bulan Mei 2018 (sebelum Pilkada Bali 2018). Responden pada penelitian ini tersebar secara proporsional di sembilan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali. Total

responden dalam penelitian ini sebanyak 1.080 orang. Responden adalah penduduk Bali yang pada saat penelitian dilakukan berusia 17 tahun atau lebih (telah memiliki hak pilih dalam Pilkada Bali 2018).

Survei ini memiliki toleransi kesalahan (*Margin of Error/MoE*) sebesar  $\pm 3$  persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Teknik pencuplikan data yang digunakan adalah *Multistage Random Sampling*. Teknik ini dipilih karena *sampling frame* yang tidak homogen.

Seluruh kabupaten kota yang ada di Bali masuk sebagai wilayah pengambilan sampel. Di sembilan kabupaten/kota tersebut diambil 108 desa/kelurahan secara acak sesuai dengan proporsi sampel di kabupaten yang bersangkutan. Selanjutnya, di masing-masing desa/kelurahan diambil 10 responden yang tersebar di *banjar/kampung* yang ada di desa terpilih. Pada masing-masing *banjar* dipilih dua KK, kemudian di KK terpilih diambil responden dengan metode *kish grid*.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *Statistical Package for Social Science (SPSS)*. Data yang disajikan berupa data frekuensi, tabulasi silang dan hasil uji *Chi Square* untuk melihat hubungan antar variabel. Penulis menyadari akan adanya kritik terhadap pendekatan kuantitatif dalam melihat tendensi politik uang, dimana sering kali persoalan yang dihadapi adalah masalah *social desirability bias*.

Hal ini coba ditekan dengan bentuk pertanyaan yang tepat untuk disajikan dalam kuesioner.

Sampling dalam penelitian ini dapat dikatakan representatif jika dilihat dari profil responden. Berdasarkan hasil tabulasi frekuensi terlihat bahwa gender responden dalam survei ini berimbang 50:50. Proporsi responden terbesar ada di Kabupaten Buleleng (16,7 persen) dan terkecil pada Kabupaten Klungkung (4,6 persen). Ini sama dengan proporsi jumlah pemilih di Bali berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Bali 2018. Survei ini juga memperlihatkan bahwa pemilih di Bali paling banyak menamatkan pendidikan SMA/Sederajat yaitu sebanyak 39 persen.

### 3. Konsep dan Teori

Dalam penelitian ini digunakan dua konsep dan satu teori. Dua konsep tersebut adalah *party-id* dan *vote buying*. Teori yang digunakan untuk melihat hubungan antara kedua konsep tersebut adalah teori hubungan *party-id* dan *vote buying* dari Susan Stokes dan Burhanuddin Muhtadi.

#### 3.1. Konsep *Party-Id*

Identifikasi partai politik (*party-id*) merujuk pada kedekatan psikologis seseorang pada partai tertentu (Bone & Ranney, 1981). Kedekatan psikologis seseorang dengan partai politik menurut teori identifikasi partai ini mirip dengan kedekatan psikologis

seseorang dengan agama yang dipeluknya. Dalam konteks tersebut ada yang memiliki identifikasi yang sangat kuat dan ada pula yang sangat lemah atau netral. Dalam konsep identifikasi partai politik ini, pemilih dilihat memiliki konsistensi pilihan partai. Dengan kata lain, pemilih memilih partai yang sama tiap kali pemilu dilaksanakan. Kavanagh (1983) menjelaskan, konsep identifikasi partai ini mirip dengan loyalitas partai atau kesetiaan seorang pemilih terhadap partai tertentu (Kavanagh, 1983).

Konsep identifikasi diri dengan partai politik atau yang disingkat dengan *party-id* merupakan bagian penting dari pendekatan psikologis dalam teori perilaku memilih. Konsep identifikasi dalam hal ini seperti yang dikutip Mujani dari Campbell adalah *orientasi afeksi individu terhadap kelompok penting dalam masyarakat*. Oleh karena itu, definisi konseptual dari identifikasi partai politik (*Party-id*) adalah orientasi afeksi, atau perasaan seseorang terhadap partai politik. *Party-id* dipercaya memiliki pengaruh yang kuat dan luas pada sikap politik (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2019).

Identifikasi partai merupakan ikatan psikologis yang stabil antara pemilih dengan partai politik tertentu, sehingga pemilih yang memilikinya tidak lagi dipengaruhi oleh faktor jangka pendek dalam menentukan pilihan politiknya. Identifikasi partai merupakan komponen psikologis yang memberi sumbangan bagi

stabilitas dukungan terhadap partai politik. Identitas partai politik berada pada tingkat sikap atau orientasi (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2019).

Identitas kepartaian (*party-identification/party-id*) dapat memunculkan pengaruh yang kuat sebagai variabel independen dalam berbagai sikap politik individu. Identifikasi individu terhadap partai politik dapat berorientasi positif dan negatif. Identifikasi positif terhadap partai memiliki kemiripan dengan identifikasi diri seseorang terhadap agama tertentu. Individu tersebut akan mengidentifikasikan diri mereka sebagai “Saya adalah Partai X”, “Saya adalah Partai Y” seperti mereka mengidentifikasikan diri mereka sebagai “Muslim”, “Kristen”, “Hindu”. Sementara itu, pada individu yang memiliki identifikasi negatif maka dia akan merespons dengan tidak memiliki hubungan/afiliasi dengan partai politik dengan mengidentifikasikan dirinya sebagai “tidak berpartai” (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2019).

Faktor identifikasi partai politik dalam perilaku memilih di Indonesia dikatakan kian menurun sejak tahun 1999 hingga 2019 dan dikatakan tidak mampu menjelaskan perilaku memilih masyarakat Indonesia. Jumlah pemilih di Indonesia yang masih memiliki identifikasi partai politik pada rentangan tahun 2014 hanya tersisa 14 persen (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2019). Angka

ini merupakan angka yang sangat rendah jika dibandingkan dengan hasil pengukuran pada masa awal reformasi. Pada tahun 1999 sekitar 86 persen pemilih Indonesia mengidentifikasi diri dengan partai tertentu. Kemudian pengukuran berikutnya dilakukan pada tahun 2001 dan diperoleh angka yang jauh berbeda. Pada tahun 2001, pemilih yang merasa dekat dengan partai tertentu atau memiliki *party-id* hanya tersisa 33 persen. Setahun menjelang Pemilu 2004, angka pemilih dengan *party-id* menjadi 55 persen. Mengalami peningkatan cukup signifikan dari dua tahun sebelumnya. Setelah Pemilu 2004, penurunan jumlah pemilih dengan *party-id* di Indonesia kembali terjadi. Pada tahun 2005, hasil survei yang disajikan dalam buku Mujani, Liddle, & Ambardi (2019) memperlihatkan pemilih dengan *party-id* di Indonesia hanya tersisa 30 persen. Angka tersebut terus menurun hingga menjelang Pemilu 2009. Pada tahun pemilu tersebut, jumlah pemilih yang memiliki *party-id* tinggal 18 persen. Menurunnya jumlah pemilih dengan *party-id* ini, menurut Mujani, Liddle, & Ambardi (2019) disebabkan oleh faktor melemahnya daya tarik tokoh-tokoh sentral partai politik yang muncul pada masa sebelumnya. Dinamika perubahan ketokohan partai cukup tinggi, sehingga memperlemah daya ikat psikologis massa dengan partainya (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2019).

### 3.2 Konsep *Vote Buying*

Keberadaan uang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Uang atau sumber daya finansial lainnya telah menjadi salah satu faktor determinan dalam kontestasi elektoral pascareformasi di Indonesia. Cage (2020) secara skeptis bahkan menjelaskan bahwa dalam demokrasi siapa yang membayar maka dia yang menang (Cage, 2020). *Vote Buying* (politik uang/politik transaksional) merupakan bentuk distribusi uang tunai kepada pemilih menjelang pemilihan (Aspinall & Berenschot, 2019).

Dalam konteks demokrasi Indonesia kontemporer, *vote buying* dikenal dengan istilah *serangan fajar*, karena uang dibagikan kepada pemilih yang menjadi target pada pagi hari di hari pemilihan, sebelum mereka datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). *Vote Buying* menjadi strategi elektoral yang dipilih oleh politisi karena menjadi pilihan rasional, dengan probabilitas keberhasilan yang tinggi. Insentif yang ditawarkan oleh *vote buying* juga lebih besar jika dibandingkan dengan model kebijakan programatik (Kuo, 2020). Lebih lanjut, dalam konteks kebijakan nonprogramatik, *vote buying* dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk klientelisme yang fokus pada dukungan individu pemilih (Stokes, Dunning, Nazareno, & Brusco, 2013).

### 3.3. Hubungan Antara *Party-id* dan *Vote Buying*

*Party-id* dan *Vote Buying* memiliki keterkaitan sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhtadi (2013), rendahnya *party-id* memiliki kontribusi terhadap meningkatnya praktik politik uang di tingkat massa. Semakin rendah *party-id* seseorang, semakin besar kemungkinan dia menerima praktik politik uang. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat *party-id* pemilih maka semakin rendah sikap penerimaannya terhadap politik uang (Muhtadi, 2013). Konsep yang dijelaskan oleh Muhtadi (2013) tersebut mengacu kepada tradisi *swing voter* (Stokes, 2005), bahwa partai politik tidak perlu menghabiskan sumber daya kepada pemilih yang sudah memiliki loyalitas/identifikasi terhadap partai politik tertentu, mereka hanya perlu fokus untuk mengalokasikannya untuk pemilih yang masih belum menentukan pilihan (*swing-voter*).

Pada sisi yang berbeda, terdapat tradisi lain yang disebut dengan *core voter* (Stokes, Dunning, Nazareno, & Brusco, 2013), kondisi saat partai politik cenderung menasar basis massa yang loyal terhadap partai. Strategi ini menurut (Stokes, Dunning, Nazareno, & Brusco, 2013) bukan dilakukan atas dasar ingin melakukan pembelian partisipasi pemilih loyal, melainkan merupakan dampak sikap predatoris tim sukses dalam perburuan rente (Muhtadi, 2020).

Mengacu kepada perdebatan teoretis di atas, tulisan ini menggunakan perspektif *core voters* dari temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Stokes, et.al (2013) dan Muthadi (2020) bahwa pola *vote buying* yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Bali 2018 menargetkan pada basis massa/konstituen partai yang loyal.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Temuan dalam riset ini akan dibagi ke dalam dua bagian yakni (1) kondisi *party-id* di Provinsi Bali dan (2) kondisi *vote buying* di Provinsi Bali.

##### 4.1. Kondisi *Party-Id* di Provinsi Bali Menjelang Pilkada 2018

Untuk melihat tingkat identifikasi partai politik, pertanyaan yang kami ajukan adalah *apakah anda merasa dekat dengan partai politik tertentu?* Hasilnya adalah masyarakat Bali memiliki tingkat *party-id* yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata *party-id* nasional, yaitu 24 persen berbanding 14 persen. Jika hasil tersebut dilihat berdasarkan proporsi gender, maka berdasarkan hasil tabulasi silang, responden laki-laki memiliki perasaan kedekatan yang lebih tinggi (25,7 persen) dibandingkan dengan responden perempuan (22,8 persen).

Sementara itu, jika diurutkan berdasarkan wilayah, maka Kabupaten Tabanan menjadi daerah dengan tingkat *party-*

*id* tertinggi yang mencapai 40 persen, dan Kabupaten Klungkung menjadi daerah dengan tingkat *party-id* paling rendah di Provinsi Bali, yaitu hanya 6 persen. Secara lebih lengkap, hasil tabulasi silang antara tingkat *party-id* dan wilayah di Provinsi Bali, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1**

Tingkat *Party-Id* Berdasarkan Wilayah di Provinsi Bali

KAB/KOTA	MERASA DEKAT DENGAN PARTAI TERTENTU	
	YA	TIDAK
BADUNG	24.2%	75.8%
BANGLI	35.5%	64.5%
BULELENG	23.3%	76.7%
DENPASAR	8.6%	91.4%
GIANYAR	29.2%	70.8%
JEMBRANA	30.9%	69.1%
KARANGASEM	13.3%	86.7%
KLUNGKUNG	6.0%	94.0%
TABANAN	40.0%	60.0%

Sumber: Diolah oleh Penulis (2020).

Provinsi Bali selama ini dikenal sebagai daerah “merah” karena selalu didominasi oleh PDI-Perjuangan<sup>1</sup> pada hampir setiap gelaran pemilihan umum. Kondisi ini juga terkonfirmasi melalui hasil survei yang dilakukan bahwa 48 persen dari responden yang menyatakan diri merasa dekat dengan partai politik tertentu, mengidentifikasi pilihan

1 PDI-Perjuangan merupakan partai yang memiliki kedekatan dengan pemilih tertinggi (*party-id*) sebesar 25,9 persen pada tahun 2014 (Muhtadi, 2020)

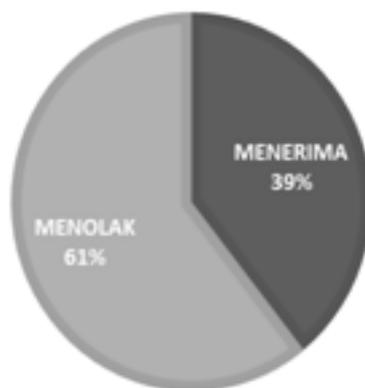
politiknya adalah Partai PDI-Perjuangan. Dari temuan data yang memperlihatkan 24 persen pemilih Bali masih memiliki perasaan dekat dengan partai tertentu dan sebagian besarnya adalah pemilih PDI-Perjuangan, maka asumsi mengenai Bali sebagai wilayah dengan pemilih yang memiliki *party-id* dan daerah basis PDI-Perjuangan dapat dikonfirmasi.

#### 4.2. Kondisi *Vote Buying* di Provinsi Bali Menjelang Pilkada 2018

Untuk mengukur tingkat *vote buying* (jual beli suara/politik uang) dalam Pilkada Bali 2018, pertanyaan yang digunakan dalam survei yang diacu oleh tulisan ini adalah sebagai berikut: *Jika ada kandidat atau tim suksesnya memberikan uang pada Bapak/Ibu agar memilih kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur, Apakah Bapak/Ibu akan menerima uang tersebut?*

Dari hasil survei diketahui bahwa 39 persen responden menyatakan mereka menerima jika kandidat atau tim suksesnya menawarkan uang untuk memilih kandidat tersebut. Angka tersebut berarti prevalensi politik uang di Bali dalam Pilkada Bali 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi politik uang (*Vote Buying Index*) dalam Pemilu 2019 yang hanya berkisar pada rentangan 25-33 persen (Muhtadi, 2020). Data ini menunjukkan perkembangan dari data tentang politik uang di Bali yang pernah dipublikasikan

Muhtadi pada tahun 2013. Data tersebut telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa di tahun 2013, jumlah pemilih yang menyatakan menolak politik uang di Bali adalah 75 persen. Pada tahun 2018 jumlah mereka yang menolak praktik politik uang hanya 61 persen. (lihat Gambar di bawah ini)



**Gambar 1.** Tabulasi Jawaban dari pertanyaan: *Jika ada kandidat atau tim suksesnya memberikan uang pada Bapak/Ibu agar memilih kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur, Apakah Bapak/Ibu akan menerima uang tersebut?*

Lebih lanjut, pada tabulasi silang antara gender dan sikap terhadap *vote buying* ditemukan bahwa pemilih perempuan cenderung lebih permisif terhadap politik uang (40,2 persen) dibandingkan dengan pemilih laki-laki (38,5 persen). Data tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2**

Tabulasi Silang antara Gender dan Sikap Terhadap *Vote Buying*

GENDER	SIKAP TERHADAP POLITIK UANG	
	MENE-RIMA	MENO-LAK
LAKI-LAKI	38.5%	61.5%
PERE-MPUAN	40.2%	59.8%

Sumber: Diolah oleh Penulis (2020)

Sementara itu, pada tingkatan wilayah, Kabupaten Buleleng menjadi daerah dengan tingkat prevalensi politik uang tertinggi di Provinsi Bali, yaitu 56,6 persen, disusul oleh Kabupaten Karangasem dengan 50,4 persen. Kota Denpasar dan Kabupaten Badung menjadi daerah dengan prevalensi politik uang yang relatif rendah yaitu 22,5 persen. Jika angka ini disandingkan dengan prevalensi politik uang di level nasional, maka dapat dikatakan bahwa data awal ini memperlihatkan kecenderungan prevalensi politik uang di dua kabupaten tersebut lebih rendah dari rata-rata nasional. Secara lebih lengkap, hasil tabulasi silang antara sikap responden terhadap politik uang dan wilayah kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3**

Prevalensi Politik Uang Berdasarkan Wilayah

KAB/KOTA	SIKAP TERHADAP POLITIK UANG	
	MENE-RIMA	MENO-LAK
BADUNG	22.5%	77.5%
BANGLI	40.9%	59.1%
BULELENG	56.6%	43.4%
DENPASAR	25.9%	74.1%
GIANYAR	41.7%	58.3%
JEMBRANA	46.4%	53.6%
KARANGASEM	50.4%	49.6%
KLUNGKUNG	30.0%	70.0%
TABANAN	30.0%	70.0%

Sumber: Diolah oleh Penulis (2020)

Meningkatnya angka prevalensi politik uang di Provinsi Bali dalam lima tahun terakhir perlu menjadi perhatian khusus bagi para pemangku kepentingan untuk dapat merumuskan strategi kebijakan pembangunan yang tepat untuk menanggulangi dampak tingginya prevalensi politik uang di Provinsi Bali, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di enam kabupaten, termasuk Kabupaten Karangasem yang dalam hal ini memiliki prevalensi politik uang yang tergolong tinggi (lebih dari 50 persen).

Temuan penelitian berikutnya yang menarik untuk dikaji lebih lanjut oleh peneliti berikutnya adalah adanya bukti awal di Bali bahwa intensitas akses internet pemilih memiliki hubungan

dengan *party-id* dan toleransi mereka terhadap politik uang.

Mengacu kepada hasil survei yang dilakukan ditemukan data bahwa semakin sering seseorang mengakses internet maka semakin dia tidak merasa memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu. Terbukanya akses informasi melalui internet menyebabkan pemilih justru menjauh dari partai politik. Temuan ini juga menjelaskan kegagalan partai dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik, meskipun mereka melakukan rangkaian kampanye dan sosialisasi yang masif melalui berbagai media, tetapi mereka belum mampu untuk meningkatkan *party-id* dari pemilih. Secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4**

Tabulasi Silang Intensitas Akses Internet dan *Party-Id*

INTENSITAS AKSES INTERNET	MERASA DEKAT DENGAN PARTAI TERTENTU	
	YA	TIDAK
SETIAP HARI	15.9%	84.1%
3-4 KALI SEMINGGU	17.1%	82.9%
SEMINGGU SEKALI	21.8%	78.2%
TIDAK PERNAH	25.3%	74.7%
TIDAK JAWAB	56.6%	43.4%

Sumber: Diolah oleh Penulis (2020)

Sementara itu, penelitian ini juga menemukan keterkaitan antara

intensitas akses internet dengan tendensi pemilih untuk menoleransi praktik politik uang. Makin tinggi intensitas akses internet masyarakat, maka makin besar kecenderungan mereka untuk menyatakan menolak praktik politik uang, dan sebaliknya. Data terkait hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 5**

Tabulasi Silang Intensitas Akses Internet dan *Toleransi Vote Buying*

INTENSITAS AKSES INTERNET	SIKAP TERHADAP POLITIK UANG	
	MENE-RIMA	MENO-LAK
SETIAP HARI	15.9%	84.1%
3-4 KALI SEMINGGU	17.1%	82.9%
SEMINGGU SEKALI	21.8%	78.2%
TIDAK PERNAH	25.3%	74.7%
TIDAK JAWAB	56.6%	43.4%

Sumber: Diolah oleh Penulis (2020)

Salah satu keterbatasan penelitian ini adalah belum membahas secara mendalam serta memberikan analisis atas korelasi antara akses internet dan *party-id*. Akan tetapi, penelitian ini, diharapkan dapat menjadi *preliminary research* untuk didalami dalam riset-riset lanjutan tentang hubungan dua variabel tersebut.

#### 4.3. Analisis Hubungan *Party-Id* dan *Vote Buying* dalam Pilkada Bali 2018

Mengacu kepada dapat yang disajikan di dua bagian sebelumnya, dapat dijelaskan

bahwa Bali adalah provinsi dengan tingkat *party-id* yang tinggi serta sekaligus merupakan daerah dengan prevalensi politik uang yang tinggi. Untuk melihat korelasi di antara dua variabel tersebut, penulis melakukan *Uji Chi Square* dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 6**

Hubungan Antara Party-Id dan Vote Buying

MERASA DEKAT DENGAN PARTAI TERTENTU	SIKAP TERHADAP POLITIK UANG	
	MENE-RIMA	MENO-LAK
YA	48.6%	51.4%
TIDAK	36.3%	63.7%

Sumber: Diolah oleh Penulis (2020)

Dalam *Uji Chi Square* yang dilakukan memperlihatkan angka *Sig* 0.000. Angka Signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan signifikan antara *party-id* dan sikap terhadap politik uang.

Tingginya *party-id* dan tingginya prevalensi politik uang di Bali sejalan dengan tradisi pemikiran *Core Voter* (Stokes, Dunning, Nazareno , & Brusco, 2013), bahwa partai politik fokus untuk mempertahankan basis massa yang sudah mereka miliki. Data survei Pilkada Bali 2018 menunjukkan bahwa pemilih yang memiliki kedekatan dengan partai

politik memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menerima politik uang.

Temuan dimana tingkat *party-id* berhubungan dengan prevalensi politik uang di Bali, umumnya terjadi bukan karena partai politik ingin melakukan pembelian partisipasi pemilih loyal, melainkan merupakan dampak sikap predatoris tim sukses dalam perburuan rente.

Temuan menunjukkan perkembangan terakhir yang terjadi di Bali. Jika pada tahun 2013 Muhtadi menyebutkan bahwa *party id* di Bali tergolong tinggi dengan tendensi politik uang yang rendah, dimana 75 persen pemilih menyatakan ini bukan praktik yang dapat diterima, maka pada tahun 2018, Bali telah menjadi wilayah dengan *party id* tinggi dengan prevalensi politik uang yang juga tinggi.

Temuan ini sekaligus memperlihatkan perubahan bentuk dari politik uang di Bali dari semula menyasar kelompok *swing voter* menjadi lebih fokus untuk menggarap *core voter*. Angka identifikasi partai politik masyarakat Bali yang cenderung tinggi ini dapat diasumsikan dalam konteks kinerja partai politik yang lebih baik dalam merawat dan menjaga harapan konstituen sehingga membentuk basis pemilih yang loyal.

Pada sisi lain, tingginya prevalensi politik uang mengindikasikan bahwa masih lemahnya pendidikan politik dan pengawasan partisipatif yang

dilakukan oleh masyarakat sipil. Celah ini perlu dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan sinergi dalam melakukan pendidikan politik dan pendidikan pemilih yang lebih masif untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat baik dalam penyelenggaraan maupun pengawasan pemilu.

Mengacu kepada Tabel 5 di atas, Bali pada prinsipnya sudah memiliki basis pemilih dengan kemampuan literasi politik yang cukup baik. Sekitar 84,1 persen responden yang memiliki akses internet setiap hari cenderung menolak politik uang. Modal ini dapat diamplifikasi melalui sosialisasi yang masif dan tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan *awareness* masyarakat dalam menolak politik uang.

## 5. Simpulan

Penelitian ini menemukan fakta bahwa pada tahun 2018, Bali merupakan daerah dengan tingkat identifikasi partai yang tergolong tinggi di Indonesia, sekaligus menjadi wilayah dengan prevalensi politik uang yang cukup tinggi. Kedua variabel tersebut terlihat berhubungan secara signifikan.

Temuan riset ini juga memperlihatkan terjadinya peningkatan prevalensi politik uang dalam rentangan tahun 2013-2018, dari 25 persen menjadi 38 persen di Provinsi Bali. Hal ini sekaligus menunjukkan

bahwa pemilih di Bali semakin permisif terhadap politik uang. Data tersebut mengonfirmasi pandangan Stokes, Dunning, Nazareno & Brusco (2013), dan temuan Muhtadi (2019), yang menjelaskan bahwa pemilih dengan identifikasi kepartaian yang tinggi (*core voter*) menjadi target dari politik uang. Temuan ini sekaligus membantah temuan awal Muhtadi (2013) dan Stokes (2005) yang menjelaskan bahwa pemilih dengan identifikasi kepartaian yang tinggi (*swing voter*) bukan target dari politik uang. Pada akhirnya, politik uang justru lebih ditoleransi oleh pemilih yang memiliki *party-id*. Tingginya tingkat *party-id* pada satu sisi menunjukkan bahwa partai masih dipercaya oleh pemilih di Bali, tetapi pada sisi lain, tendensi politik uang juga mengalami peningkatan menandakan pragmatisme masyarakat yang meningkat. Fenomena tingginya prevalensi politik uang di wilayah yang memiliki pemilih dengan *party id* ini diduga disebabkan oleh relasi antara calon dan tim sukses yang masih berdasar kepada relasi predatori dalam usaha untuk menguasai sumber daya yang sebesar-besarnya. Dugaan awal ini masih perlu dibuktikan dengan melakukan penelitian lanjutan bermetode kualitatif. Sesuai dengan karakteristiknya, penelitian kualitatif akan mampu memberikan analisis secara lebih mendalam dan komprehensif tentang mengapa pemilih dengan

identifikasi kepartaian yang tinggi justru menjadi sasaran dari praktik politik uang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. (2014). When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 545-570.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Bone, H. A., & Ranney, A. (1981). *Politics and Voters*. USA: McGraw-Hill.
- Cage, J. (2020). *The Price of Democracy: How Money Shapes Politics and What To Do About It*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Kavanagh, D. (1983). *Political Science and Political Behaviour*. London: George Allen & Unwin.
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (2007). *Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*. New York: Cambridge University Press.
- KPU Provinsi Bali. (2020, Oktober 12). *Hasil Pemilihan Gubernur Bali 2018*. Diolah dari bali.kpu.go.id: [https://bali.kpu.go.id/bankdata/kategori\\_bankdata/49](https://bali.kpu.go.id/bankdata/kategori_bankdata/49)
- Kuo, D. (2020). *Clientelism, Capitalism, and Democracy: The Rise of Programmatic Politics in the United States and Britain*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Muhtadi, B. (2013). Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara "Party-ID" dan Patron-Klien. *Jurnal Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI*, 41-57.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Muhtadi, B. (2020). *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mujani, S., Liddle, W., & Ambardi, K. (2019). *Kaum Demokrat Kritis: Analisis Perilaku Pemilih Indonesia sejak Demokratisasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Stokes, S. C. (2005). Perverse Accountability: A Formal Model of Machine Politics with Evidence from Argentina. *American Political Science Review*, 315-325.

Stokes, S. C., Dunning, T., Nazareno, M., & Brusco, V. (2013). *Brokers, Voter, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics*. New York: Cambridge University Press.